

ANALISIS PENERAPAN PENCATATAN LAPORAN KEUANGAN BERBASIS SAK ETAP PADA USAHA MIKRO KECIL MENENGAH

(Studi kasus pada UMKM Mebel Wismo Kriasto Sihono)

Disusun Oleh:

Candra Saputra

Email: candra1400012099@webmail.uad.ac.id

Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Ahmad Dahlan

ABSTRACT

This study aims to uncover umkm's perceptions regarding the accounting process and financial statements; reveal the obstacles in the application of SAK ETAP SMEs. This study uses a qualitative approach, the sample of this research is SMEs Wismo Kriasto Sihono. Data collection techniques used were interviews and documentation. The results of the study indicate that SMEs have not made financial records in accordance with SAK ETAP and stated that it is difficult to do accounting records with all the limitations that they have. SMEs Wismo Kriasto Sihono have not applied accounting records according to SAK ETAP

Key words: Accounting Record, Financial Statements, SAK ETAP, SMEs.

LATAR BELAKANG

Indonesia adalah negara maju dan berkembang, satu di antaranya bidang ekonomi. Indonesia terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi maju dan berkembangnya sektor ekonomi. Satu di antara faktor tersebut Sumber Daya Manusia (SDM), Sumber Daya Alam (SDA), dan Modal Usaha. Kegiatan modal usaha terdapat jenis-jenis usaha satu di antaranya Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).

Sesuai dengan definisi undang-undang no.9 tahun 1995 usaha kecil merupakan usaha produktif dengan skala kecil. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sudah terbukti memiliki peran dan

memberikan kontribusi bagi perekonomian di Indonesia. Peluang kerja semakin bertambah dengan adanya Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), sehingga dapat mengurangi angka pengangguran. Peran lain dari UMKM yaitu memberi kontribusi bagi kenaikan PDB (Produk Domestik Bruto) di Indonesia. Hal tersebut dapat dilihat dari kedudukan dan fungsi penting yang secara bersama-sama dengan badan usaha milik Negara atau swasta dalam melakukan berbagai usaha demi tercapainya kesejahteraan bagi masyarakat. Adapun sektor usaha di Indonesia yang terdiri atas jenis usaha barang, jasa dan manufaktur.

Menurut Kementerian Perindustrian usaha barang adalah suatu produk fisik (berwujud) yang dapat diberikan kepada seorang pembeli dan melibatkan pemindahan kepemilikan dari penjual kepada pembeli. Usaha jasa adalah suatu jenis usaha yang lebih menekankan pada suatu yang tidak berwujud yang dapat

diberikan kepada pembeli. Usaha manufaktur adalah kegiatan usaha yang menghasilkan barang dan jasa yang bukan tergolong produk primer, yang dimaksud produk primer yaitu produk-produk yang tergolong bahan mentah yang dihasilkan oleh kegiatan eksploitasi sumber daya hasil pertanian, kehutanan, pertambangan, dan kelautan yang mungkin mencakup produk pengelolaan awal sampai dengan bentuk spesifikasi teknis yang standar dan lazim diperdagangkan sebagai produk primer.

Tujuan didirikan sebuah perusahaan adalah untuk memperoleh profit yang maksimal sehingga dapat mempertahankan dan menjaga kelangsungan perusahaan itu sendiri. Oleh karena itu, semua kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan selalu diarahkan dalam pencapaian kestabilan kelangsungan hidup dan perkembangan perusahaan. Perekonomian yang semakin berkembang dengan di tandainya dengan pendirian perusahaan yang semakin banyak, akan menimbulkan persaingan antar perusahaan yang semakin ketat, sehingga membuat bidang keuangan harus mendapat perhatian yang lebih. Suatu media sangat penting dibutuhkan dalam proses pengambilan keputusan ekonomis dalam bidang keuangan. Media tersebut berupa laporan keuangan.

UMKM perlu melakukan pencatatan laporan keuangan agar memudahkan para pengelola UMKM untuk mengetahui keadaan perusahaannya. Namun informasi yang terdapat pada laporan keuangan belum bisa digunakan seutuhnya untuk menilai kinerja dari suatu perusahaan, masih dibutuhkan analisis yang tepat terhadap laporan keuangan tersebut.

Berdasarkan SAK ETAP (Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik) yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI), setiap perusahaan telah diwajibkan untuk membuat

laporan keuangan yang terdiri dari Neraca, Laporan Laba Rugi, Laporan Perubahan Modal, Laporan Arus Kas dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK).

Daerah Istimewa Yogyakarta adalah kota pendidikan, selain banyak Universitas, Yogyakarta terdapat beberapa jenis UMKM. Satu di antaranya di kabupaten Bantul. Menurut Warta Ekonomi.co.id (2018) "Industri mikro kecil di Bantul menurut Badan Pusat Statistik mengalami pertumbuhan rata-rata 8% per tahun, dan ini akan terus kita dorong," kata Kepala Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Bantul (Sulistyanto 2018). Menurut dia pertumbuhan industri mikro kecil khususnya di Bantul disebabkan berbagai faktor di antaranya makin menggeliatnya usaha di bidang ekonomi kreatif, dan di Bantul yang berjumlah sekitar 18 ribu UMKM mayoritas bergerak di sektor kerajinan.

UMKM Wismo Kriasto Sihono berdiri pada tahun 1999, yang berlokasi di Jl Bantul km 7 Pucung Rt/Rw 54 Pendowoharjo Sewon Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. UMKM Wismo Kriasto Sihono merupakan perusahaan manufaktur yang bergerak dalam bidang mebel yang memproduksi berbagai macam furniture dari limbah kayu jati, satu diantaranya, meja, kursi, figura, tempat payung, tempat buah dan lain-lain. UMKM Wismo Kriasto Sihono sangat membantu masyarakat, khususnya masyarakat Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Alasannya karena UMKM Wismo Kriasto Sihono akan menghasilkan bermacam jenis furnitur yang dibutuhkan oleh masyarakat luas, khususnya masyarakat Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Kebutuhan akan furnitur semakin meningkat, terutama disaat-saat tertentu. Seperti pembeli rumah baru, pembangunan hotel baru dan lain-lain.

Berdasarkan beberapa pernyataan sebelumnya maka tema yang dapat diajukan pada penelitian ini yaitu “Analisis Penerapan Pencatatan Laporan Keuangan Berbasis SAK ETAP pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah Wismo Kriasto Sihono”. Alasan yang mendasari peneliti memilih tema ini karena banyaknya usaha Mebel dan Kerajinan di Daerah Istimewa Yogyakarta, khususnya di Bantul. Selain itu akses untuk memperoleh data penelitian lebih mudah.

RUMUSAN MASALAH

Apakah UMKM Wismo Kriasto Sihono sudah melakukan pencatatan laporan keuangan berbasis SAK ETAP

LANDASAN TEORI

1. Akuntansi

Horngren dan Harrison (2007:7) menyatakan bahwa akuntansi adalah sistem informasi yang mengukur aktivitas bisnis, memproses data menjadi laporan, dan mengkomunikasikan hasilnya kepada para pengambil keputusan. Siklus akuntansi merupakan bagian dari proses dari akuntansi tersebut. Soemarso (2009:90) menyatakan bahwa siklus akuntansi adalah tahap-tahap kegiatan mulai dari terjadinya transaksi sampai dengan penyusunan laporan keuangan sehingga siap untuk pencatatan transaksi periode berikutnya.

2. Laporan Keuangan

Harahap (2009:105) mendefinisikan bahwa laporan keuangan menggambarkan kondisi keuangan dan hasil usaha suatu perusahaan pada saat tertentu atau jangka waktu tertentu. Kieso (2011:5) menyatakan bahwa laporan keuangan merupakan sarana pengkomunikasian informasi keuangan utama kepada pihak-pihak di luar perusahaan. Laporan ini menampilkan sejarah perusahaan yang dikuantifikasi

dalam nilai moneter. Informasi keuangan mengenai aktivitas ekonomi dalam suatu perusahaan tidak hanya dicatat dalam satu siklus akuntansi, tetapi juga diolah sedemikian rupa dan diringkas sehingga dapat memberikan informasi finansial yang signifikan dalam pengambilan keputusan. Laporan keuangan pada dasarnya adalah hasil dari proses akuntansi yang dapat digunakan sebagai alat untuk berkomunikasi antara data keuangan atau aktivitas suatu perusahaan dengan pihak-pihak yang berkepentingan dengan data atau aktivitas perusahaan tersebut (Munawir, 2004).

Laporan keuangan pada dasarnya adalah hasil dari proses akuntansi yang dapat digunakan sebagai alat untuk berkomunikasi dengan pihak yang berkepentingan dengan kondisi keuangan dan hasil operasi perusahaan (Jumingan, 2011). Laporan keuangan disusun dan ditafsirkan untuk kepentingan manajemen dan pihak lain yang menaruh perhatian atau mempunyai kepentingan dengan data keuangan perusahaan. Jadi laporan keuangan akan dapat dinilai kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban, struktur modal perusahaan, distribusi aktiva, keefektifan penggunaan aktiva, hasil usaha/pendapatan yang telah dicapai, beban-beban tetap yang harus dibayar, serta nilai-nilai buku tiap lembar saham perusahaan yang bersangkutan.

3. SAK ETAP

Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik atau SAK ETAP merupakan standar akuntansi keuangan yang diperuntukkan bagi entitas tanpa akuntabilitas publik. SAK ETAP disahkan oleh 18 orang anggota Dewan Standar Akuntansi Keuangan pada tanggal 19 Mei 2009 di Jakarta. SAK ETAP terdiri atas 30 bab dan dilengkapi dengan daftar istilah dibagian akhir. (Ikatan Akuntansi Indonesia, 2009)

ANALISIS DATA

A. ANALISIS DATA

1. Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini data diperoleh setelah melakukan survei terlebih dahulu kemudian dilanjutkan dengan wawancara. Survei awal yang dilakukan oleh peneliti kepada objek penelitiannya itu UMKM Wismo Kriasto Sihono bertujuan sebagai langkah awal untuk mendapatkan informasi serta izin untuk melakukan wawancara terhadap objek penelitian. Selanjutnya peneliti melakukan wawancara untuk memperoleh informasi lebih mendalam. Dalam melakukan wawancara peneliti lebih banyak mendengarkan apa yang diceritakan oleh narasumber serta memberikan arahan terhadap topic yang dibahas sehingga peneliti dapat mengajukan berbagai pertanyaan berikutnya sehingga membuat penelitian ini lebih terarah.

1. Reduksi Data

a. Sistem Pencatatan

Tabel 5.1
Sistem Pencatatan

Indikator	Realisasi	Alat ukur
Pemilik melakukan pencatatan serta pelaporan keuangan	Melakukan pencatatan namun belum sesuai SAK ETAP	SAK ETAP

35

b. Faktor Internal

1) Pengetahuan

Tabel 5.2

Pengetahuan

Indikator	Realisasi	Alat ukur
Pengetahuan Terhadap SAK ETAP	Belum mengetahui tentang SAK ETAP	SAK ETAP

2) Kompetensi

Tabel 5.3
Kompetensi

Indikator	Realisasi	Alat ukur
Ada orang yang berkompetensi melakukan pencatatan keuangan	Belum adanya pihak yang berkompetensi	Kompetensi akuntansi

3) Sudut pandang / Pola pikir

Tabel 5.4
Sudut pandang / Pola pikir

Indikator	Realisasi	Alat ukur
Pola	Pandangan	Sudut

piker pelaku UMK M diharapkan sadar pentingnya pencatatan keuangan	pemilik UMK M masih menganggap jika UMK M yang kecil tidak perlu ada pencatatan sesuai SAK ETAP	pendang / pola pikir pelaku UMK KM
--	---	------------------------------------

tentang pentingnya pencatatan sesuai SAK ETAP	an sosialisasi dan pelatihan terhadap para pelaku UMK M	
---	---	--

c. Faktor Eksternal

1) Sosialisasi dan pelatihan pemerintah

Tabel 5.5
Sosialisasi dan pelatihan pemerintah

Indikator	Realisasi	Alat ukur
Pemerintah mampu berperan aktif dalam mensosialisasikan	Pemerintah kurang peran aktif dalam memberikan	SAKETAP

2) Pengawasan pihak pengkredit (Kreditur)

Tabel 5.6

Pengawasan pihak pengkredit (Kreditur)

Indikator	Realisasi	Alat ukur
Pihak pengkredit melakukakan pengawasan terhadap calon nasabah, tidak hanya melihat jaminan, tetapi	Kurangnya pengawasan karena pihak pengkredit hanya melihat dari sisi jaminannya saja	Pengawasan kreditur

bagi pelaku UMK M dilihat dari laporan keuangan		
---	--	--

tahun 2008 tentang kriteria UMK M untuk memperlakukan pajak yang maksimal		
---	--	--

3) Pengawasan dari pihak (fiskus) pajak

Tabel 5.7

Pengawasan dari pihak (fiskus) pajak

Indikator	Realisasi	Alat ukur
Pihak fiskus pajak melakukakan pengawasan terhadap UMK M yang sudah dikategorikan sesuai UU No.20	Fiskus mengperhatikan hal tersebut sehingga UMK M yang merasa UMK M kecil tidak membayar pajak	Pengawasan (Fiskus) pajak

4) *Display* Data (Penyajian Data)

Tabel 5.8

Penyajian Data

Prinsip/Indikator	Alat ukur	Realisasi	
		Ya	Tidak
Pencatatan keuangan sesuai SAK ETAP	SAK ETAP		✓
Pengetahuan SAK ETAP	SAK ETAP		✓
Kompetensi pelaku UMKM dalam melakukan pencatatan	Kompetensi Akuntansi		✓

n			
Pola pikir pelaku UMKM terhadap pencatatan SAK ETAP	Pola pikir / Sudut Pandang		✓
Sosialisasi dan pelatihan terhadap UMKM dari pemerintah tentang SAK ETAP	Sosialisasi dan pelatihan dari pemerintah		✓
Pengawasan dari pihak kreditur terhadap pengajuan kredit pelaku UMKM	Pengawasan pihak kreditur		✓
Pengawasan dari pihak fiskus pajak terhadap pelaku UMKM	Pengawasan fiskus pajak		✓

Pencatatan keuangan dalam sebuah usaha merupakan komponen penting dalam kegiatan operasional UMKM. Dalam pelaksanaannya tidak semua UMKM melakukan pencatatan keuangan yang sederhana maupun yang sesuai dengan SAK ETAP, termasuk dengan UMKM Wismo Kriasto Sihono yang sudah melaksanakan pencatatan keuangan yang sangat sederhana namun belum sesuai SAK ETAP.

"Laporan keuangan ya saya cumin nyatatnya, cumin nyatatnya gini mas. Pembelanjaan biaya produksi itu dari beli bahan baku dan bahan penolong itu habis berapa, terus gaji karyawan itu perbulan berapa, ah terus pemasukan kita itu ada berapa, tinggal ngitung saja kok, nanti pemasukan dikurangi pembiayaan, dikurangi gaji karyawan, wong (orang) keliatan sekali kok mas kalo rugi atau nggak tuh"

Dalam implementasinya sistem informasi akuntansi yang di lakukan UMKM Wismo Kriasto Sihono sudah melakukan pencatatan laporan keuangan namun belum sesuai SAK ETAP. Alasan pemilik UMKM belum melaksanakan pencatatan laporan yang sesuai SAK ETAP dikarenakan menurut pemilik terlalu rumit, dan lebih enak melakukan pencatatan yang sederhana.

"Pernah dulu, sudah pernah di pelatihan mahasiswa UGM tapi itu rumit mas, sulit, ya enakan yang sederhana aja deh, kita belanja dicatat, ini apa catat gitu, nanti setelah ada penjualan, oh kemarin saya ada pemasukan sekian dan pengeluaran sekian."

Berdasarkan hasil survei yang dikatakan pemilik UMKM tersebut bahwa sebelumnya sudah ada pelatihan tentang pencatatan laporan keuangan yang sesuai SAK ETAP, namun pemilik mengatakan

B. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Sistem pencatatan keuangan UMKM Wismo Kriasto Sihono

masih sangat rumit dan lebih enak menggunakan pencatatan yang sederhana. (Pemilik UMKM Wismo Kriasto Sihono).

Hal ini sejalan dengan teori perilaku beralasan (*Theory of Reasoned Action*) yang di kembangkan oleh Ajzen dan Martin Fishbein pada tahun 1980 (*Jogiyanto, 2007*). Teori ini menyatakan bahwa seorang dapat melakukan atau tidak melakukan suatu perilaku tergantung dari niat yang dimiliki oleh orang tersebut. Dalam pencatatan akuntansi pada UMKM Wismo Kriasto Sihono, pemilik belum mengimplementasikan pencatatan laporan keuangan sesuai SAK ETAP karena di pengaruhi oleh niat pemilik usaha. Niat atau keinginan pemilik untuk mengembangkan usahanya tidak dibarengi dengan niatan untuk melakukan pencatatan setiap transaksi yang berkaitan dengan kegiatan operasionalnya.

2. Faktor-faktor yang menyebabkan tidak terlaksananya keuangan berbasis SAK ETAP

Dalam pencatatan serta penyusunan laporan keuangan berbasis SAK ETAP tidak semua berjalan lancar. Dalam implementasinya jarang UMKM yang menerapkan pencatatan serta penyusunan laporan keuangan berbasis SAK ETAP, termasuk UMKM WISMO KRIASTO SIHONO. Ada beberapa factor internal maupun eksternal yang menyebabkan tidak terlaksananya penyusunan laporan keuangan berbasis SAK ETAP.

a. faktor internal penyebab tidak terlaksananya penyusunan laporan keuangan berbasis SAK ETAP

faktor internal merupakan faktor dari dalam yang mempengaruhi implementasi dari pencatatan keuangan berbasis SAK ETAP. Faktor internal yang menyebabkan

tidak terlaksananya penyusunan laporan keuangan berbasis SAK ETAP pada UMKM WISMO KRIASTO SIHONO ini yakni,

1) Pengetahuan tentang SAK ETAP

“Oh belum, rumit mas”

Kurangnya pengetahuan pemilik UMKM WISMO KRIASTO SIHONO mengenai SAK ETAP dalam penyusunan laporan keuangan. Selama ini hanya pencatatan sederhana yang dilakukan oleh UMKM MEBEL WISMO KRIASTO SIHONO, hal ini dikarenakan kurangnya pengetahuan dan pemahaman yang dimiliki oleh pemilik UMKM WISMO KRIASTO SIHONO. Jadi, latar belakang pendidikan memiliki peran yang cukup besar terhadap bentuk penyusunan pencatatan keuangan yang diterapkan oleh UMKM WISMO KRIASTO SIHONO.

2) Belum adanya pihak yang berkompeten dalam pencatatan maupun penyusunan laporan keuangan

“Belum ada”

Pemilik UMKM WISMO KRIASTO SIHONO merasa belum profesional untuk membuat laporan keuangan sesuai SAK ETAP. Pemilik kurang disiplin dalam pelaksanaan pembukuan sesuai SAK ETAP dikarenakan waktu yang ada sudah tersita untuk pekerjaan, sehingga sulit sekali menyisihkan waktu untuk menyusun sistem pencatatan yang sesuai SAK ETAP.

3) Pandangan pemilik tentang SAK ETAP

“Rumit, dan karena saya juga pengrajin kecil”

Pandangan pemilik usaha bahwa pencatatan laporan keuangan yang sesuai SAK ETAP itu masih susah dan rumit, ini

sesuai dengan teori perilaku beralasan (*theory of reasoned action*) yang dikembangkan oleh Icek Ajzen dan Martin Fishbein pada tahun 1980. Teori ini menyatakan bahwa seseorang atau individu akan memanfaatkan sistem informasi dengan alasan bahwa sistem informasi tersebut akan member manfaat atau kegunaan bagi dirinya. Melihat dari kenyataan dilapangan terkait dengan penerapan SAK ETAP jadi dapat dikatakan bahwa pelaku UMKM akan memanfaatkan atau mengimplementasikan pencatatan keuangan berdasarkan SAK ETAP apabila pencatatan tersebut akan member manfaat atau kegunaan bagi dirinya.

b. Faktor eksternal penyebab tidak terlaksananya penyusunan laporan keuangan berbasis SAK ETAP

faktor eksternal merupakan faktor dari luar UMKM tersebut yang mempengaruhi implementasi dari pencatatan keuangan berbasis SAK ETAP. Faktor eksternal yang menyebabkan tidak terlaksananya penyusunan laporan keuangan berbasis SAK ETAP pada UMKM WISMO KRIASTO SIHONO ini yakni,

1) Kurangnya sosialisasi pada pelatihan tentang SAK ETAP

“Pernah dulu, sudah pernah di pelatihan dari mahasiswa UGM, tapi itu rumit mas, sulit, ya enakan yang sederhana aja deh”

Menurut hasil penelitian oleh Rudianto dan Siregar (2011) menyimpulkan bahwa pemberian informasi dan sosialisasi dapat meningkatkan pemahaman UMKM terhadap SAK ETAP.

Jadi dalam hal ini, pemerintah merupakan pihak penting dalam terlaksananya penerapan pencatatan dan penyusunan laporan keuangan secara SAK ETAP, karena

jika pemerintah gencar melakukan sosialisasi, maka penerapan SAK ETAP dapat maksimal dilaksanakan oleh para pelaku UMKM sehingga para pelaku UMKM mendapatkan gambaran tentang kondisi keuangan UMKM tersebut. Begitupun sebaliknya, jika pemerintah kurang melaksanakan sosialisasi dan pelatihan tentang SAK ETAP maka yang terjadi para pelaku UMKM tidak akan menerapkan pencatatan dan penyusunan laporan keuangan sesuai SAK ETAP.

2) Kurangnya pengawasan dari pihak pengkreditan

“Kredit bank pernah, biasanya bank liat usahanya aja tidak ditanya pembukuannya”

Pihak perbankan merupakan salah satu pihak ketiga yang berhubungan dengan permodalan UMKM. Dalam memberikan pinjaman kepada UMKM pihak perbankan seharusnya memperhatikan aspek kelayakan suatu kegiatan usaha, aspek legalitas, dan adanya jaminan fisik maupun non-fisik sebagai faktor pengamanan. Untuk mengetahui kondisi keuangan calon debitur, maka pihak perbankan memerlukan laporan keuangan. Selain untuk mengrtahui kondisi kesehatan perusahaan utamanya yang mencakup kondisi likuiditas, kecukupan modal, porsi hutang, dan profitabilitas. Pihak perbankan memerlukan adanya laporan keuangan untuk memperkirakan volume usaha calon debitur yang ditunjukkan dengan besarnya asset dan penjualan. Serta dengan adanya laporan keuangan pihak perbankan dapat mengestimasi jumlah beban pinjaman yang dapat ditanggung oleh calon debitur (Susilo, 2010).

Mekanisme pembuatan laporan keuangan yang sudah disediakan oleh bank merupakan salah satu strategi perbankan untuk mempermudah UMKM dalam memenuhi

persyaratan pengajuan kredit, hal ini dapat membahayakan karena bisa mendorong pihak perbankan untuk menyalurkan kredit kepada pihak yang tidak tepat. Selain itu, hal itu menyebabkan UMKM menjadi malas dalam memenuhi ketentuan SAK ETAP, karena selama ini mereka telah dipermudah dengan adanya pembuatan laporan keuangan oleh pihak perbankan.

Menurut Raharjo (1993) dalam Auliyah (2012) menyatakan tidak adanya regulasi yang mewajibkan penyusunan laporan keuangan bagi UMKM mengakibatkan rendahnya penyusunan laporan keuangan. Jadi perhatikan dari pihak regulator terkait dengan peraturan yang mewajibkan penyusunan laporan keuangan bagi UMKM sangat diperlukan.

Dalam implementasinya dapat dikatakan pihak perbankan merupakan pihak ketiga selain pemerintah yang memiliki peran aktif untuk mengontrol tentang penerapan SAK ETAP yang diterapkan oleh UMKM tersebut. Hal tersebut dapat dilakukan dengan melihat kondisi laporan keuangan ketika pengajuan pinjaman ke pihak perbankan. Dan seharusnya pihak perbankan berperan aktif juga dalam mengontrol tentang penerapan SAK ETAP sehingga dalam pelaksanaannya sama-sama menguntungkan kedua belah pihak.

1) Kurangnya pengawasan dari pihak (fiskus) pajak

“Ndak kena, saya kan masih dibawah kelas, masih kelas menengah kebawah”

Pelaku UMKM juga berhubungan dengan pihak fiskus dalam hal perhitungan serta pembayaran pajak. Pemasukan tambahan dari pajak UMKM merupakan kontribusi yang sangat penting dalam mendukung program pembangunan yang diusahakan oleh pemerintah serta untuk melepaskan

ketergantungan Indonesia dari pinjaman luar negeri.

Untuk menentukan besarnya penghasilan kena pajak maka UMKM harus menyusun laporan keuangan. Namun prakteknya, kesesuaian pembuatan laporan keuangan UMKM dengan SAK ETAP masih jauh dari apa yang diharapkan. Oleh karena itu, untuk mempermudah perhitungan pajak bagi pelaku usaha kecil dan menengah maka dikeluarkan Peraturan Pemerintah No.46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto (omset) yang tidak melebihi Rp 4.800.000.000 dalam 1 tahun pajak.

Maksud pemerintah untuk menyederhanakan perhitungan pajak demi mempermudah perhitungan pajak merupakan suatu hal yang positif, namun dibalik itu implementasi SAK ETAP pada UMKM akan terasa semakin berat, karena untuk bisa membayar pajak kini para pelaku UMKM tidak dituntut untuk membuat laporan keuangan yang sesuai dengan standar, selain itu kurangnya pengawasan pula dari pihak fiskus terkait dari apa yang dihitung oleh UMKM terkait pajak yang akan dibayar.

Dalam pelaksanaannya seharusnya fiskus lebih memperhatikan dengan teliti tentang keadaan sebenarnya yang terjadi pada UMKM. Terkait pembayaran pajak UMKM, pihak pelaku UMKM banyak yang beranggapan bahwa usaha mereka masih kecil sehingga tidak perlu membayar pajak. Padahal sudah diatur sebelumnya dalam PP No.16 Tahun 2013 berkaitan dengan pajak yang harus dibayarkan oleh UMKM. Jadi pihak fiskus harus lebih jeli dalam mengontrol keadaan UMKM tersebut dan mencoba untuk mensosialisasikan tentang pentingnya laporan keuangan dan dengan

kejelian tersebut dapat menambah pendapatan pajak dari UMKM.

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Dalam pelaksanaan kegiatan operasional UMKM Wismo Kriasto Sihono sudah melaksanakan pencatatan namun belum sesuai SAK ETAP. Hal ini dikarenakan beberapa faktor internal, maupun faktor eksternal.
2. Dalam implementasinya, terdapat beberapa faktor internal dan eksternal yang menyebabkan tidak terlaksanannya penyusunan laporan keuangan berbasis SAK ETAP yaitu:

a. Faktor internal berkaitan dengan, *pertama*, kurangnya pengetahuan dan pemagaman berkaitan dengan pencatatan dan penyusunan laporan keuangan sesuai SAK ETAP. *Kedua*, tidak adanya pihak yang professional dalam pengelolaan penyusunan laporan keuangan. *Ketiga*, pandangan pemilik usaha tentang SAK ETAP masih rumit, dan masih pengrajin kecil.

b. Faktor eksternal berkaitan dengan. *Pertama*, kurangnya sosialisasi dan pelatihan dari pihak pemerintah. *Kedua*, kurangnya pengawasan dari pihak perbankan dalam proses peminjaman modal untuk kegiatan UMKM tersebut. *Ketiga*, kurangnya pengawasan dari fiskus dalam pembayaran pajak, sehingga dalam pelaksanaannya pihak UMKM merasa omset yang diperoleh dalam skala kecil tanpa memperhatikan PP No.46 tahun 2013 tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu. Sehingga dalam implementasinya,

fiskus dapat memaksimalkan pendapatan pajak dari UMKM.

B. KETERBATASAN PENELITIAN

Penelitian ini memiliki keterbatasan sebagai berikut:

1. Dalam pelaksanaan penelitian, objek penelitian kurang begitu memahami berkaitan dengan topic pembahasan, sehingga harus dijelaskan secara perlahan.
2. Keterbatasan penelitian ini meliputi subjektifitas yang ada pada peneliti. Penelitian ini tergantung pada interpretasi peneliti tentang makna yang tersirat dalam wawancara sehingga kecenderungan untuk bias masih tetap ada.

C. SARAN

Saran yang dapat diuraikan dari hasil penelitian diatas:

1. Bagi pihak UMKM dan pihak *stakeholder*

Mengingat besarnya manfaat yang bisa diperoleh dari penerapan akuntansi, kepada para pelaku UMKM yang belum menerapkan akuntansi agar menerapkan akuntansi sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Bagi *stakeholder* untuk ikut serta dalam mendukung dan mengawasi implementasikan SAK ETAP. Dukungan dan pengawasan ini tentunya akan membantu mendisiplinkan UMKM dalam melakukan pencatatan keuangan serta membantu pihak perbankan dalam menganalisis kelayakan usaha dan pihak fiskus dalam memenuhi administrasi perpajakan. Selain itu perlu adanya badan pengawas yang khusus untuk mengawasi dan mengevaluasi implementasi dari SAK ETAP. Sehingga dengan adanya badan pengawas ini kedepannya seluruh UMKM

yang ada di Indonesia dapat menerapkan pencatatan keuangan berbasis SAK ETAP.

2. Bagi peneliti selanjutnya

Peneliti memiliki beberapa saran untuk peneliti selanjutnya sebagai berikut:

1. Peneliti selanjutnya dapat memperkaya pertanyaan agar dapat menghasilkan faktor-faktor yang lainnya.
2. Untuk penelitian selanjutnya, perdalam kembali tentang SAK ETAP agar dapat menjelaskan serta mampu memberikan pengetahuan tentang pentingnya SAK ETAP kepada objek penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

- Andriani, Lilya. 2014. *Analisis Penerapan Pencatatan Keuangan Berbasis SAK ETAP pada Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)*. Sebuah studi intrepetalif pada PEGGY SALON.
- Ardiyos. 2008. *Kamus Besar Akuntansi*. Jakarta: Citra Harta Prima.
- Auliyah. 2012. *Penerapan Akuntansi Berdasarkan SAK ETAP pada UMKM Kampung Batik Sidoarjo*.
- Charles T. Horngren dan Walter Horrison. 2007. *Akuntansi jilid 1. Edisi ke-7*. Jakarta: Penerbit Eirlangga.
- Harahap, Sofiyon Syafri. 2009. *Analisis Atas Laporan Keuangan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Hidayah, Fauziah, Nurul. 2018. *Perkembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Bantul*.
Didapatkan:<https://www.wartaekonomi.co.id/read171045/industri-mikro-kecil-bantul-tumbuh-8-persen>
- Ibrahim. 2015. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI). 2009. *Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik*. Di unduh pada <http://www.iaiglobal.or.id/> tanggal 10 Maret 2018.
- Jugiyanto, 2007. *Sistem informasi keprolakuan*. Yogyakarta: Penerbit Andi
- Jumingan. 2011. *Analisis Laporan Keuangan*. Cetakan ke-4. Jakarta: Bumi Aksara.
- Kasmir. 2010. *Analisis Laporan Keuangan*. Jakarta: PT. Grafindo Persada.
- Kieso, Donald, Jerry Weggand, Terry Warfield. 2011. *Intermediate accounting. IFRS edition*. Jhon Wiley & Sons. Inc, USA.

- Miles, M.B, Huberman, A.M. 1994. *Qualitative data analysis*, 2nd ed. USA: Sage Publication
- Munawir, S. 2010. *Analisa Laporan Keuangan*. (edisi 4). Yogyakarta: Liberty.
- Moleong, L. J. 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Nedsal Sixpria., Suharti., dan Warsini. 2004. *Implementasi Standar Akuntansi Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) Dalam Proses Akuntansi dan Penyusunan Laporan Keuangan Pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)*.
- Norkamsih., Kusuma., dan Kalangi. 2016. *Penerapan SAK ETAP pada Penyusunan Laporan Keuangan*.
- Pratiwi, Ade Astalia., Sondakh., dan Kalangi. 2014. *Analisis Penerapan SAK ETAP pada Penyajian Laporan Keuangan PT. Nachindo Manado Suisan*.
- Purba, Marisi. 2010. *International Financial Reporting Standards, Konvergensi & Kendala Aplikasinya di Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Rusdiantoro dan Siregar. 2011. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penyusunan Laporan Keuangan Berbasis SAK ETAP*.
- Sekaran, Uma. 2011. *Metode Penelitian Untuk Bisnis*. Jakarta: Salemba Empat.
- Soemarsono. 2009. *Akuntansi Pengantar Jilid 1*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sugiono. 2010. *Metodologi Penelitian Kuantitatif & RND*. Bandung: Alfabeta.
- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995. *Definisi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)*.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008. *Tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)*.